

**PERLINDUNGAN WARGA SIPIL ETNIS ROHINGYA DARI
DISKRIMINASI PEMERINTAHAN MYANMAR**

Fahrul Umam, Iskandar

Ilmu Hukum, Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
Email: fachrulumam25@gmail.com, Iskandar200398@gmail.com

ABSTRACT

Human rights are gifts given by the Almighty, therefore everyone must respect and appreciate them. However, there are often violations and deprivation of the rights that have been given by God. As happened to the Rohingya in Myanmar. The conflict that occurred in Myanmar has been going on for a long time and has become an issue of international human rights violations because Rohingya ethnic civilians are discriminated against and tortured and killed, therefore countries in the world must provide protection and resolve the conflict. The purpose of this study was to determine the role of ASEAN and the OIC in responding to the humanitarian crisis that occurred to the Rohingya ethnicity and to analyze the influence of diplomatic relations between Indonesia and Myanmar in resolving the issue of human rights violations in Myanmar. The method used in this research is normative-empirical research with literature study. The organizations involved in resolving the Rohingya ethnic conflict and the Myanmar government are ASEAN and the OIC. These two organizations provide humanitarian assistance in the form of providing basic needs such as food and medicine. The form of settlement is to bring this issue into the international realm by establishing diplomatic relations and also urging the Myanmar government to restore all victims' rights in the form of a house as their original place of residence and urging Myanmar to provide protection to every citizen without discrimination. While the influence of Indonesian diplomacy on the humanitarian crisis of Rohingya civilians, namely the Indonesian government's diplomacy can send humanitarian assistance to victims where the government previously closed humanitarian access to victims of the conflict, besides that the State of Indonesia also offered a solution to the crisis experienced by the Myanmar state so that the conflict occurred. what is happening now is not protracted. From this diplomacy, world countries and international and regional organizations to participate in providing such assistance

Keywords: Rohingya Ethnicity, Human Rights, Myanmar

ABSTRAK

Hak asasi manusia merupakan anugerah yang diberikan oleh Maha Kuasa, karena itu setiap orang harus menghargai dan menghormatinya. Namun, sering kali terjadi pelanggaran dan perampasan terhadap hak yang sudah diberikan tuhan tersebut. Sebagaimana yang terjadi terhadap etnis Rohingya di Myanmar. Konflik yang terjadi di Myanmar terjadi cukup lama dan menjadi isu pelanggaran HAM internasional karena warga sipil etnis Rohingya di diskriminasi dan disiksa serta dibunuh, oleh karena itu negara-negara di dunia harus memberikan perlindungan dan menyelesaikan konflik tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran ASEAN dan OKI dalam menanggapi krisis kemanusiaan yang terjadi terhadap etnis Rohingnya serta menganalisis pengaruh hubungan diplomasi Indonesia dan Myanmar dalam menyelesaikan isu pelanggaran HAM di Myanmar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris dengan studi kepustakaan. Organisasi yang terlibat dalam menyelesaikan konflik etnis Rohingya dan pemerintahan Myanmar yaitu ASEAN dan OKI. Kedua organisasi ini memberikan bantuan kemanusiaan berupa memberikan kebutuhan pokok seperti makanan dan obat-obatan. Adapun bentuk penyelesaian yang dilakukan yaitu membawa isu ini kedalam ranah internasional dengan melakukan hubungan

diplomati dan juga mendesak agar pemerintahan Myanmar dapat mengembalikan semua hak-hak korban berupa rumah sebagai tempat tinggal asalnya dan mendesak Myanmar untuk memberikan perlindungan kepada setiap warga negaranya tanpa adanya diskriminasi. Sedangkan pengaruh diplomasi Indonesia terhadap krisis kemanusiaan warga sipil Rohingya yaitu diplomasi pemerintah Indonesia dapat mengirimkan bantuan kemanusiaan kepada korban yang mana sebelumnya pemerintahan menutup akses kemanusiaan terhadap korban konflik tersebut, disamping itu Negara Indonesia juga menawarkan solusi atas krisis yang dialami oleh negara Myanmar tersebut sehingga kejadian konflik yang terjadi saat ini tidak sampai berlarut-larut. Dari adanya diplomasi tersebut negara-negara dunia dan organisasi internasional dan regional untuk ikut serta dalam memberikan bantuan tersebut.

Kata Kunci: Etnis Rohingya, Hak Asasi Manusia, Myanmar

PENDAHULUAN

Hak asasi manusia adalah sebuah anugerah yang diberikan oleh yang maha kuasa, sebagai anugerah diberikan langsung oleh tuhan maka tiada seorang pun dan institusi apapun dapat merebutnya setiap orang termasuk negara harus menghormatinya, dan negara wajib untuk menjaganya serta memberikan perlindungan kepadanya. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh manusia menurut kodratnya, serta memiliki sifat suci. (Kania, 2018) Manusia dilahirkan dalam keadaan merdeka dan tetap harus diperlakukan sama tanpa pengecualian apapun. Sebagai hak hukum, hak asasi manusia dimaksudkan untuk melindungi martabat manusia. Negara memberikan jaminan terhadap hak asasi manusia, yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam deklarasi universal hak asasi manusia ditegaskan bahwa agar setiap manusia yang ada di dunia ini menghormati setiap hak asasi manusia yang lain. (Kania, 2015)

Daniel S. Lev menegaskan bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada semua manusia, karena manusia memiliki satu spesies biologis, kesatuan yang paling mendasar, sehingga dengan didasari oleh satu kesamaan ini maka perbedaan yang ada akan menjadi tidak berarti. Yoza Yokota berpendapat bahwa hak asasi manusia diperuntukkan untuk setiap manusia, terlepas dari ras, agama, budaya dan kebangsaan. (Gede Sudika Mangku, 2013) Dengan demikian, konsep hak asasi manusia bersifat universal dan tidak mengenal makna atau interpretasi yang hanya

bercirikan kekhasan lokal. Banyak pemerintah yang tidak menyukai hal ini, karena konsep yang bersifat universal akan membatasi segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah dan justru melindungi warga negara dari kekuasaan negara. Pemerintah Burma semakin intens sejak 1950 ketika mereka menuntut otonomi. Sejarah penting lainnya Momen tersebut terjadi pada tahun 1978 ketika pemerintah menjalankan "Operasi Raja Naga". Operasi tersebut memuncak pada tahun 1982 dalam bentuk melucuti status kewarganegaraan semua etnis Rakine-Muslim. Sejak itu, pemerintah membiarkan mereka hidup tetapi dengan memberlakukan kerja paksa. Selain itu, pemerintah juga sering melakukan tindakan kekerasan dan mengimplementasikan kebijakan diskriminatif terhadap Rohingya yang tidak lagi diakui sebagai warga negara.(Asrieyani, 2013)

Pola penganiayaan ini berlanjut hingga sekarang dan semakin memburuk ketika Myanmar melakukan reformasi demokrasi. Rohingnya di Myanmar tidak memiliki kewarganegaraan telah menderita penganiayaan dan diskriminasi ekstrem selama beberapa dekade. Rohingnya adalah salah satu etnis minoritas yang paling teraniaya di dunia dan diakui secara internasional sebagai de jure stateless.(Salman Sohel, 2017) Masyarakat Rohingnya dibantai, permukiman dihancurkan, dan kemudian diusir secara paksa. Hal ini mengakibatkan eksodus besar-besaran Rohingnya keluar dari Myanmar karena Penindasan yang dilakukan terhadap etnis Rohingnya di Myanmar pada tahun 2016 merupakan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh angkatan bersenjata Myanmar terhadap Muslim Rohingnya. Kelompok etnis Muslim Rohingnya merupakan salah satu dari total 135 etnis minoritas di Burma Myanmar. Rohingnya mererupakan salah satu etnis agama yang teraniaya di dunia di era kontemporer.(Roy Chowdhury, 2020) Adapun jumlah etnis minoritas kelompok Muslim Rohingnya dianggap sebagai kelompok etnis yang paling teraniaya, menurut PBB.(Priyahita Pudjibudojo, 2019)

Diskriminasi yang telah dialami oleh etnis Muslim Rohingnya terjadi sejak tahun 1948 ketika terjadi pemisahan etnis oleh Inggris.(Itchikaya

Mitzy, 2014) Masyarakat Rohingya mengalami berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia, seperti genosida, hak kebebasan bergerak serta pengusiran warga etnis Rohingya.(Arianta et al., 2020) Rakhine merupakan tempat di mana pemisahan tersebut dilakukan, yang memisahkan antara Myanmar Buddha dan Muslim Rohingya.

Kekerasan terhadap Rohingya mengakibatkan kemiskinan, kesengsaraan, dan pelanggaran hak asasi Mmanusia. Etnis minoritas Rohingya hidup dengan hak yang sangat terbatas, termasuk kebebasan bergerak, menikah, dan bekerja. Tahun 1982 Di bawah pemerintahan militer yang menguasai Burma-Myanmar, muncul kebijakan baru yang disebut Undang-Undang Kewarganegaraan Burma tahun 1982 tidak diakui sebagai bagian dari 135 kelompok etnis resmi di Myanmar. Pemerintah menganggap Rohingya sebagai imigran ilegal dari Bangladesh, dan orang Rohingya tidak menerima kewarganegaraan, hak atas tanah, dan pekerjaan tanah pendidikan yang layak dan memadai. Ketiadaan kewarganegaraan menjadikan Rohingya sebagai populasi terbesar tanpa kewarganegaraan. Tanpa status kewarganegaraan, etnis Rohingya sangat rentan terhadap eksploitasi, penahanan, dan pelecehan dan orang Rohingya tidak menerima kewarganegaraan, hak atas tanah, dan pekerjaan tanah pendidikan yang layak dan memadai. Ketiadaan kewarganegaraan menjadikan Rohingya sebagai populasi terbesar tanpa kewarganegaraan. Tanpa status kewarganegaraan, etnis Rohingya sangat rentan terhadap eksploitasi, penahanan, dan pelecehan dan orang Rohingya tidak menerima kewarganegaraan, hak atas tanah, dan pekerjaan tanah pendidikan yang layak dan memadai. Ketiadaan kewarganegaraan menjadikan Rohingya sebagai populasi terbesar tanpa kewarganegaraan. Tanpa status kewarganegaraan, etnis Rohingya sangat rentan terhadap eksploitasi, penahanan, dan pelecehan.

Diskriminasi yang berkelanjutan terhadap, serangan dan pelanggaran luas terhadap hak-hak Rohingya telah menyebabkan arus keluar pengungsi baru dari Myanmar. Pada tahun 1991, lebih dari 300.000 Rohingya

melarikan diri ke Bangladesh setelah kebrutalan (kerja paksa, pemerkosaan, pemerkosaan berkelompok, pembunuhan, penganiayaan, mobilitas terbatas, dll.) yang dilakukan oleh anggota NASAKA Pada tahun 1991-1992 saja, diskriminasi, kekerasan, dan penerapan praktik kerja paksa oleh otoritas Burma memicu eksodus sekitar 300.000 orang Rohingya ke Bangladesh.(Ullah & Chattoraj, 2018)

Konflik yang terjadi dan terus menerus menimbulkan korban dari waktu ke waktu ini membutuhkan solusi agar dapat menghentikan jatuhnya para korban konflik tersebut dan selain itu juga dibutuhkan penanganan konflik sehingga tidak memperpanjang krisis kemanusiaan di Myanmar selain itu juga dibutuhkan perlindungan hukum dengan memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat demi terpenuhinya hak-hak yang diberikan oleh hukum kepada masyarakat.(Nawawi, 2019) Rohingya yang lebih banyak menderita kerugian, membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah terkait. Namun pada kenyataannya, Pengungsi Rohingya tidak mendapatkan perhatian pemerintah Myanmar dan justru mendapat diskriminasi dan menambah penderitaan kelompok etnis Rohingya.

Setelah sekian lama menderita secara fisik dan mental akibat perlakuan yang tidak pantas oleh militer Myanmar, pada akhir tahun 2008, etnis Rohingya melarikan diri dari Myanmar dengan harapan bisa mendapatkan perlakuan yang lebih manusiawi. Negara di Kawasan ASEAN merupakan tujuan utama para pengungsi untuk mencari kehidupan yang jauh lebih baik dan bebas dari diskriminasi. Akan tetapi, selama krisis berlangsung, mitra ASEAN tidak banyak menunjuk dukungan. Di sisi lain, pemerintah Myanmar belum mengubah sikap politik dan hukumnya, yang merendahkan Rohingya sebagai bagian dari negara Myanmar. Organisasi internasional lain telah menunjukkan perhatian yang lebih besar untuk kasus ini, Organisasi Kerjasama Islam (OKI) merupakan salah satu organisasi yang menyampaikan keprihatinannya terhadap diskriminasi

yang dialami oleh etnis muslim Rohingya. Tanggapan OKI terhadap krisis tersebut antara lain memberikan bantuan kemanusiaan, menggunakan pendekatan diplomatik dengan beberapa organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan membentuk kelompok pencari fakta untuk mengumpulkan informasi faktual tentang akar krisis.(Rantau Itasari, 2020)

Beberapa penelitian yang relevan dengan tulisan ini diantaranya yaitu:

Dewa Sudika Mangku yang berjudul Kasus Pelanggaran HAM Etnis Rohingya Dalam Perspektif ASEAN dalam jurnal ini membahas tentang bagaimana peran ASEAN dalam pembebasan etnis Rohingya dari kekerasan. perbedaan dengan jurnal ini yaitu, dalam jurnal ini selain dibahas tentang peran ASEAN dan OKI dalam menanggapi krisis kemanusiaan etnis Rohingnya, juga memaparkan tentang pengaruh diplomasi negara Indonesia dalam mengatasi konflik Rohingya.

Gulia Ichikaya Mitzy yang berjudul Perlawanan Etnis Rohingya Terhadap Kebijakan Diskriminatif Pemerintah Myanmar. Dalam jurnal tersebut membahas mengenai diskriminasi etnis Rohingya yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar.

Ketut Ariana, Dewa Gede Sudika Mangku, dan Ni Putu Rai Yuliantini yang berjudul Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. dalam artikel jurnal tersebut membahas tentang perlindungan HAM Internasional terhadap kasus etnis Rohingya, serta mengkaji bagaimana penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat tersebut.

Ipung Pramudya Setiawan dan Made Selly Dwi Suryanti. Keterlibatan Asean dalam Menangani Konflik Myanmar (Studi Kasus: Konflik Etnis Rohingya 2017-2019). Jurnal ini membahas tentang ASEAN yang memiliki tanggungjawab dalam melindungi negara-negara regional demi menyelesaikan konflik yang terjadi, dan hal ini menjadi bukti keterlibatan ASEAN dalam konflik Rohingya.

Andika Wahabi dari myanmar ke malysia situasi yang berkepanjangan

dari orang-orang Rohingya. Jurnal ini membahas tentang hak-hak Rohingya dari Myanmar yang masih diingkari dan dianiaya. karena kurangnya keadilan serta pengakuan dari pemerintah myanmar.(Aab Wahabi, 2018)

Dari uraian diatas, yang menjadi titik fokus pembahasan dalam artikel ini yaitu: Bagaimana peran ASEAN dan OKI dalam menanggapi krisis kemanusiaan terhadap etnis Rohingya? dan Bagaimana pengaruh diplomasi negara Indonesia dalam menyelesaikan isu konflik etnis Rohingya?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian yuridis Normatif dengan studi kepustakaan. Karena penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, maka semua data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dikategorikan sebagai data sekunder. Dalam pengumpulan data, peneliti memanfaatkan data digital, khususnya jurnal elektronik, artikel online, dan sumber berita terpilih Untuk mendapatkan hasil penelitian, data yang terkumpul harus dianalisis, pertama dengan memindai/membaca literatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Organisasi ASEAN dan OKI Dalam Menanggapi Krisis Kemanusiaan Terhadap Etnis Rohingya

a. Peran Organisasi ASEAN

Sebagai organisasi inti regional, ASEAN harus mengambil peran utama dalam menyelesaikan krisis Rohingya. ASEAN dan anggotanya memiliki kewajiban amoral untuk mengambil tindakan yang diperlukan, yang seharusnya lebih besar dari bantuan kemanusiaan. ASEAN harus mengkonkretkan identitas komunitas ASEAN dengan bekerja sama untuk mengatasi krisis. Namun demikian, ASEAN telah menunjukkan respon dalam menanggapi dan fokus pada proses diplomatik. Sebagai respon umumnya terhadap setiap kasus, ASEAN khususnya negara-negara anggota

seperti Indonesia, Malaysia, Myanmar, dan Thailand, dalam melakukan upaya diplomatik untuk merumuskan solusi.(Sun, 2014)

Baru pada tahun 2012, dalam pertemuan para kepala negara di ASEAN, pertanyaan tentang masalah Rohingya diangkat ke perwakilan tingkat tinggi dari Myanmar dan Banglades. Secara pribadi, mantan Sekjen ASEAN Surin Pitsuwan menyatakan minatnya terhadap isu tersebut. ASEAN telah melakukan dua pertemuan penting yang diadakan oleh negara-negara anggota ASEAN. Yang pertama adalah pertemuan tiga pihak antara Indonesia, Malaysia, dan Thailand, yang diadakan di Putra Jaya. Pertemuan ini dilakukan dalam menghadapi tekanan internasional bahwa negara-negara ini menyambut Rohingya ke wilayah mereka, daripada membiarkan mereka tetap terdampar di laut. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia, Malaysia dan Thailand sepakat untuk menerima Rohingya di wilayah mereka selama satu tahun. Selama periode ini, negara-negara ini memanggil masyarakat internasional untuk berpartisipasi dalam memberikan akhir yang meyakinkan bagi krisis Rohingya. Tampaknya ASEAN, atau lebih tepatnya beberapa anggotanya, ingin mengubah krisis menjadi salah satu tanggung jawab internasional. Sayangnya, Keengganan Myanmar untuk mengatasi krisis Rohingya mencerminkan sikap politiknya, yang dapat digambarkan sebagai kebijakan yang diskriminatif. Myanmar telah mengirimkan pesan yang jelas bahwa mereka tidak akan menerima penggunaan istilah 'Rohingya' selama diskusi bilateral atau multilateral. Myanmar, seperti yang telah dibahas sebelumnya, bersikeras pada istilah 'Bengali' dan memperlakukan pengungsi sebagai imigran gelap. Sampai saat ini, sikap politik Myanmar telah dihormati oleh ASEAN dan anggotanya.(Joisafita Tangdialla, 2019)

Pertemuan Istimewa Migrasi Ireguler di Samudera Hindia ini merupakan pertemuan kedua yang diselenggarakan oleh individu anggota ASEAN untuk mengatasi krisis Rohingya. Itu adalah upaya untuk menempatkan masalah di atas meja untuk diskusi di antara banyak pihak. Pertemuan ini menunjukkan peningkatan, karena mencerminkan upaya

yang lebih terkoordinasi antara pihak-pihak terkait di Asia Tenggara, tetangganya, dan organisasi internasional. Lebih penting lagi, pertemuan itu bisa melibatkan Myanmar. Pertemuan khusus Bangkok dihadiri oleh 25 perwakilan tingkat tinggi dari Afghanistan, Australia, Bangladesh, Kamboja, India, Indonesia, Iran, Laos, Malaysia, Myanmar, Selandia Baru, Pakistan, Papua Nugini, Filipina, Sri Lanka, Vietnam, dan Thailand. Tiga organisasi internasional di bawah PBB *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR), *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), *International Organization for Migration* (IOM) dan *United Nations Resident Coordinator* untuk Thailand juga hadir. sebagai peserta. Sementara itu, perwakilan Jepang, Swiss, dan Amerika Serikat hadir sebagai pengamat. Sejumlah duta besar dan *chargé d'affaires* yang berbasis di Bangkok juga mengamati *themetting* (MFA-2015).

Pertemuan khusus mencapai 17 kesimpulan prospektif, termasuk komitmen berkelanjutan dari lima negara yang paling terkena dampak untuk memberikan bantuan kemanusiaan bagi para imigran gelap dan untuk memecahkan akar penyebab masalah. Pertemuan itu juga menyambut baik bantuan kemanusiaan yang dijanjikan Amerika Serikat dan Australia ke *Rakhine State* dan *Cox's Bazar*. Yang terpenting, para pihak dalam pertemuan khusus sepakat untuk meneruskan masalah tersebut ke Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN tentang Kejahatan Lintas Negara. (Jati, 2017)

b. Peran Organisasi OKI

Kekejaman di Asia Tenggara telah menarik perhatian Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Sehari setelah Presiden Thein Sein mengumumkan keadaan darurat di Myanmar, Sekjen OKI mengungkapkan keprihatinannya dan mengutuk kekerasan terhadap Muslim Rohingya. Kekerasan terhadap Rohingya kembali muncul pada Oktober 2015 saat perayaan Idul Adha yang memakan korban jiwa. Menanggapi situasi ini, Sekjen OKI sekali lagi menyatakan keprihatinannya yang mendalam dan meminta pemerintah Myanmar untuk mengerahkan langkah-langkah

konkrit untuk menghentikan kekerasan. OKI *Contact Group on the Rohingya Muslim Minority* mengadakan konferensi tingkat menteri untuk mengevaluasi pelanggaran hak asasi manusia yang berkepanjangan di Myanmar. Konferensi tersebut menyampaikan beberapa rekomendasi kepada anggota OKI untuk mengambil tindakan diplomatik dan kemanusiaan yang diperlukan untuk mendukung Rohingya dan mendesak Myanmar untuk bekerja dengan UNHCR dalam mengembalikan pengungsi ke rumah mereka.

Dua bulan kemudian, OKI membuat pernyataan lain yang merekomendasikan agar pemerintah Myanmar mencabut peraturan 2005 yang menerapkan batasan dua anak untuk keluarga Rohingya. Pembatasan keluarga seperti itu merupakan pelanggaran langsung terhadap hak asasi manusia dan berkontribusi terhadap tekanan yang diberikan pada Rohingya. Terlepas dari protes dari masyarakat Buddhis, pada November 2013 delegasi OKI berhasil mencapai Rakhine Barat, Myanmar, untuk bertemu dengan Rohingya dan mendiskusikan situasi dengan organisasi masyarakat sipil setempat. Selain melakukan upaya kemanusiaan, pemimpin tertinggi OKI itu juga melakukan pendekatan diplomatik kepada masyarakat internasional. Upaya tegas dilakukan OKI dalam pertemuan Dewan HAM PBB pada Juli 2015.

Sebelumnya, OKI mengadopsi proposal Pakistan untuk menyelesaikan krisis yang diteruskan ke Organisasi tersebut. Proposal tersebut terdiri dari beberapa poin penting antara lain yaitu mengutuk pelanggaran hak asasi manusia di Myanmar, menyerukan Myanmar untuk memastikan keamanan dan perlindungan rakyatnya tanpa diskriminasi rasial, dan mendesak Myanmar untuk memukimkan kembali semua pengungsi di rumah masing-masing. Adopsi UNHCR atas proposal OKI yang bertajuk Situasi Hak Asasi Manusia Muslim Rohingya dan Minoritas Lainnya di Myanmar, merupakan representasi dari penentangan kuat masyarakat internasional terhadap pelanggaran hak asasi manusia di Rohingya. Selain itu, OKI mengirimkan pesan tema ke ASEAN dan lembaga

hak asasi manusianya bahwa mereka harus mengambil tindakan berani untuk mendorong Myanmar agar mematuhi mekanisme hak asasi manusia.

Sejak awal krisis Rohingya, OKI telah mengambil tindakan kemanusiaan. Bantuan kemanusiaan OKI untuk Rohingya telah ditawarkan melalui pendekatan bilateral dan multilateral. Dalam pendekatan bilateral, anggota OKI telah memberikan kontribusi individu dalam badan hak asasi manusia mereka. Di 2012, misalnya, Masyarakat Bulan Sabit Merah Turki dan Palang Merah Myanmar mencapai kesepakatan kerja sama dalam operasi bantuan kemanusiaan di Myanmar. Dengan dukungan OKI, Palang Merah Indonesia (PMI) menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada Rohingya. Negara-negara anggota OKI lainnya, seperti Arab Saudi, Turki, Qatar, Malaysia, dan Iran, juga telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi Myanmar. Di tingkat multilateral, OKI berhasil mengumpulkan US\$ 25 juta dari para anggotanya selama pertemuan konsultatif kedua tentang bantuan kemanusiaan di Doha. Bantuan Kemanusiaan untuk Rohingya Dibuat oleh Negara-negara Anggota OKI Indonesia. Bantuan resmi US\$1 Juta Palang Merah Indonesia mengirimkan tim bantuan 500 perlengkapan kebersihan, 3.000 selimut, dan 10.000 sarung. Makanan, tenda, selimut, dan sembako lainnya untuk dibagikan kepada umat Islam Iran. Anggota Majelis (Iran Parlemen), Kementerian Luar Negeri Iran, Imam Komite Bantuan Khomeini, dan Masyarakat Bulan Sabit Merah Iran (mengirim satu pengiriman) Putra 1Malaysia Club, Berat total: 24 ton Malaysia. Paket bantuan Berat total: 500 ton mengumpulkan dan mengangkut persediaan bantuan Qatar. Bulan Sabit Merah Qatar melakukan upaya bantuan di Negara Bagian Rakhine dengan bantuan yang diberikan oleh pemerintah Qatar US\$ 1,5 juta, Arab Saudi Raja Saudi Abdullah menyumbangkan uang untuk didistribusikan oleh US\$50 Juta, UNHCR untuk Rohingya 3 kendaraan ambulans dan 1.300 ton barang bantuan dasar Yayasan Kemanusiaan Khalifa Bin Zayed, di bawah arahan Presiden Yang Mulia Shaikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan. Direktorat Manajemen Bencana dan Darurat perdana menteri, Turki Yayasan Urusan

Agama, dan Kimse Yok Mu Asosiasi (yayasan amal) disumbangkan ke Turki 60 juta lira Turki (US\$ 33 juta) Mengirimkan 30 ton bantuan kemanusiaan, termasuk 2.280 kotak permen, 960 paket jatah instan, 11.000 karung.

2. Pengaruh Diplomasi Indonesia-Myanmar Dalam Penyelesaian Isu Konflik Etnis Rohingya

Dunia menanggapi tragedi kemanusiaan dengan mengecam keras pemerintah Myanmar yang masih didominasi militer. Bahkan Peraih Nobel Aung San Suu Kyi dikritik karena mengizinkan kekerasan terhadap etnis Rohingya. Berbeda dengan dunia yang hanya mengecam keras pemerintah Myanmar dan menyerukan boikot terhadap Myanmar bahkan ada tuntutan intervensi di Myanmar, Indonesia melakukan diplomasi kemanusiaan terhadap tetangganya. Diplomasi Indonesia dilakukan antara lain melalui pengiriman bantuan kemanusiaan langsung ke daerah-daerah yang terkena dampak krisis kemanusiaan.(Alfajri, 2017) Dalam konflik ini Indonesia memosisikan diri sebagai pihak ketiga untuk menengahi proses resolusi konflik yang dilakukan melalui pendekatan pemerintah dan kelompok masyarakat sipil. di tengah besarnya tekanan yang diberikan oleh dunia internasional Indonesia perlu terus melakukan politik merangkul kepada Myanmar sehingga Indonesia dapat menempatkan diri sebagai sebagai teman dan terus melanjutkan bantuan kemanusiaan yang disalurkan untuk mengatasi dampak konflik tersebut.(Rosyid, 2019)

Respon cepat dari Indonesia ini dilakukan untuk memperhatikan nasib para pengungsi yang membutuhkan bantuan pangan dan medis serta tempat tinggal. Indonesia memilih untuk membantu pengungsi yang paling banyak di Bangladesh dan sebagian dari mereka yang terkena dampak di wilayah Rakhine di Myanmar. Langkah itu diambil untuk fokus pada nasib Rohingya yang tertindas. Indonesia tidak memilih urusan internal Myanmar untuk menyelesaikan konflik Rohingya meskipun Jakarta memiliki kemampuan ini. Namun pemerintah Indonesia dalam menangani tragedi tersebut melakukan diplomasi dengan memberikan bantuan kemanusiaan. Dengan motif bantuan kemanusiaan ini, Menlu Retno

Marsudi diterima oleh Otoritas Myanmar untuk pertama kalinya sejak tragedi itu muncul kembali pada 2017. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melakukan kunjungan ke Myanmar untuk memberikan bantuan kepada korban kerusuhan di wilayah Sitte, Rakhine State. Menlu RI merupakan Menlu pertama di ASEAN yang diberikan akses oleh pemerintah Myanmar untuk mengunjungi pedalaman Rakhine State pasca kerusuhan 12 Oktober 2017.

Indonesia tidak hanya berhenti pada tahap diplomasi kemanusiaan tetapi juga menawarkan solusi yang komprehensif terhadap masalah Rohingya. Menlu Retno menyampaikan usulan Indonesia yang disebut Formula 4+1, yaitu empat elemen utama yang mestinya segera dilakukan agar krisis kemanusiaan dan keamanan di Rakhine State tidak semakin parah, ditambah satu elemen dilaksanakannya rekomendasi dari Komisi Penasehat Laporan untuk Negara Bagian Rakhine yang dipimpin oleh Kofi Annan. Formula ini membuat diplomasi kemanusiaan memiliki kerangka kerja yang cukup komprehensif. Dengan urgensi situasi yang dirasakan Rohingya di Indonesia sendiri, muncul desakan agar pemerintah bertindak keras terhadap penguasa Myanmar karena dituduh membiarkan kekerasan oleh militer terhadap Rohingya. Protes publik yang menyatakan keprihatinan atas nasib kelompok etnis Rohingya muncul di Indonesia. Bahkan gedung Kedubes Myanmar di Jakarta menjadi sasaran kemarahan warga Indonesia yang bersimpati dengan nasib kelompok etnis Rohingya yang memeluk Islam di tengah mayoritas etnis Myanmar yang beragama Buddha. Sentimen keagamaan ini muncul di Indonesia untuk menekan pemerintah di Jakarta agar mengambil tindakan terhadap pemerintah Myanmar. Berbagai tuntutan muncul dari masyarakat selain penggalangan dana untuk mengirimkan bantuan ke Myanmar. Tragedi 2017 memang sangat berat bagi Rohingya karena tidak pernah menemukan solusi sejak pintu reformasi politik di Myanmar dimulai. (Setiawan & Hamka, 2019) Indonesia memiliki kebijakan yang sangat jelas terhadap kawasan Asia Tenggara. Kawasan ini merupakan pilar pembangunan Nasional sehingga

Asia Tenggara dituntut dalam kondisi aman, bebas dari konflik antar negara, bebas konflik antar anggota ASEAN dan juga bebas dari aksi terorisme. Karena kebijakan Indonesia untuk mempertahankan wilayah yang dijaga ini, setiap insiden dan konflik yang akan mengganggu stabilitas wilayah akan ditanggapi dengan serius.

Dari kerangka geografis dan struktural, Indonesia menaruh perhatian pada isu-isu Asia Tenggara yang dalam hal ini muncul di Myanmar adalah krisis Rohingya yang multidimensi. Isu Rohingya tidak hanya dilihat dari mayoritas etnis Rohingya tetapi juga statusnya yang disebut stateless, diskriminasi dan juga pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berkelanjutan. Nasib Rohingya di dunia yang semakin terbuka menjadi perhatian dunia ditambah dengan kasus-kasus kekerasan yang bermunculan di mata dunia terutama sejak tahun 2012 dan puncaknya antara lain pada tahun 2017. Ketika isu ini muncul yang menguat sejak tahun 2012, maka Indonesia dipanggil karena salah satu mandat politik luar negeri Indonesia mengacu pada mandat bahwa Indonesia harus berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dan perdamaian dunia. Dasar kebijakan Indonesia tetap mengacu pada orientasi kebijakan Indonesia yang mengedepankan perdamaian. Namun karena di ASEAN terdapat kode etik yang tidak mencampuri urusan dalam negeri suatu negara, maka ada batasan dalam membantu etnis Rohingya. Selain itu Kebijakan luar negeri yang dimiliki oleh Indonesia adalah politik bebas aktif yang memiliki makna tidak memihak satu blok kekuatan dan ingin menciptakan perdamaian dunia. Indonesia mulai menggabungkan independensi dan diplomasi aktif yang kemudaa menjadikan Indonesia sebagai pemegang prinsip yang tidak menganggap negara lain sebagai musuh dan menambah kwan dengan sebanyak-banyaknya.(Pesona Sadewa, 2019)

Konflik di Myanmar, meski skalanya hanya menyangkut perbedaan suku dan agama, telah menimbulkan krisis kemanusiaan yang bahkan sudah lama dirasakan di Indonesia. Pengungsi Rohingya Myanmar datang ke Indonesia untuk mencari dukungan karena penindasan yang terjadi di

negara mereka. Di Aceh, misalnya, sudah ada ratusan pengungsi Rohingya di beberapa kamp. Tidak hanya di Aceh, bahkan ada yang menyebrang ke Sulawesi dan ada pula yang mendekati kantor UNHCR di Jakarta dalam upaya mencari perlindungan di negara ketiga. Meningkatnya jumlah pengungsi mendorong isu Rohingya menjadi isu regional dan menimbulkan permasalahan regional dimana tidak hanya Indonesia yang terkena krisis tetapi juga negara-negara di sekitar Myanmar seperti Malaysia. Berbeda dengan Indonesia yang bersikap lembut dan menunjukkan sikap memahami masalah ini dalam diplomasinya, Malaysia langsung mengecam perilaku junta militer dan pemerintah Myanmar yang tidak menangani etnis Rohingya sesuai prinsip kemanusiaan. Malaysia sebelumnya telah mengadopsi kebijakan luar negeri yang represif atas apa yang dilakukan Myanmar terhadap etnis Rohingya. Kebijakan tersebut membuat hubungan kedua negara menjadi "tidak nyaman". Pemerintah di Kuala Lumpur secara terbuka mengkritik kebijakan diskriminatif pemerintahan Naypyidaw yang membiarkan ribuan orang bahkan ratusan ribu menderita dari militan Buddhis dan tekanan militer. Malaysia dengan tegas menyatakan bahwa masalah ini harus dibawa ke PBB karena pelanggaran hak asasi manusia di Myanmar. (Khairi, 2016)

Diplomasi kemanusiaan Indonesia terhadap krisis kemanusiaan Rohingya di negara bagian Rakhine berperan untuk fokus meringankan beban etnis teraniaya sekaligus berperan dalam mendorong partisipasi publik dalam meringankan penderitaan Rohingya akibat latar belakang persamaan agama yaitu Islam. Isu identitas Islam juga penting dalam diplomasi kemanusiaan Indonesia sehingga muncul berbagai langkah yang melibatkan kelompok masyarakat yang membantu dalam bentuk keuangan dan pembangunan tempat ibadah. Kebijakan Indonesia dalam membantu etnis Rohingya terjadi pada tahun 2017, sehingga dapat juga dipelajari bagaimana kebijakan pemerintahan Jokowi terhadap kawasan Asia Tenggara. Kebijakan pemerintahan Jokowi tercermin dalam dokumen yang disebut Renstra 2015-2019. Kawasan Asia Tenggara disebut-sebut sebagai

lingkaran konsentris terdekat dalam politik luar negeri Indonesia, sehingga perlu menjadi fokus kebijakan. Kebijakan untuk melindungi kondisi Asia Tenggara adalah dengan memperkuat ASEAN. Dengan mendukung ASEAN secara total, kebijakan Indonesia terhadap Asia Tenggara juga tetap terjaga.

Melalui ASEAN, Indonesia memiliki peluang yang lebih luas untuk mengkoordinasikan kebijakannya sehingga memiliki kekuatan diplomatik. Dibandingkan dengan model kerja sama bilateral dengan sembilan negara di Asia Tenggara, kerangka menjaga stabilitas politik dan keamanan di Asia Tenggara lebih mudah dan berkelanjutan daripada kerja sama bilateral. Di ASEAN, Indonesia telah memantapkan dirinya sebagai “pemimpin” sehingga dapat memberikan pedoman kemana ASEAN akan pergi dan kebijakan apa yang juga tidak boleh dilakukan sesuai dengan ASEAN Treaty Amity and Cooperation (TAC), persahabatan antar anggotanya. Salah satu pedoman di ASEAN adalah tidak ikut campur dalam urusan politik dalam negeri anggotanya. Hal inilah yang memberi ASEAN kekuatan solidaritas sehingga Indonesia mampu menjaga kode etik perilaku anggotanya ketika ada masalah internal yang disebabkan oleh separatis, konflik etnis atau konflik politik lainnya. Untuk itu, Indonesia melakukan diplomasi kemanusiaan di Myanmar. Indonesia melibatkan ASEAN dalam penyaluran bantuan kemanusiaan di Rakhine State dengan alasan Myanmar adalah anggota ASEAN. Dengan demikian, situasi yang memburuk di Rakhine perlu dibantu tanpa harus melibatkan diri dalam masalah internal anggota asosiasi regional. (Rosyidin, 2015)

Peristiwa yang terjadi pada Rohingya sangat menggugah rasa kemanusiaan. Dimana Tindakan pemerintah Myanmar yang tidak memberikan kewarganegaraan bagi warga Rohingya, sikap diskriminatif, serta pengungsian terjadi, dan tidak mendapatkannya pengakuan sebagai negara bagian myanmar, serta ditiadakannya pemukiman dan tempat peribadatann lainnya. Dalam sejumlah pernyataan yang dikeluarkan Kemlu RI tampak isu kemanusiaan menjadi prioritas dalam menanggapi tragedi di Rakhine state. Kebijakan Indonesia dalam memberikan bantuan

kemanusiaan adalah memprioritaskan kelompok etnis Rohingya yang menjadi korban kekerasan daripada kelompok etnis lain di Myanmar. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan fokus perhatian Indonesia adalah krisis kemanusiaan di negara bagian Rakhine. Inilah salah satu ciri politik luar negeri Indonesia dalam menangani kasus Rohingya dengan mengutamakan apa yang bisa disebut dengan diplomasi kemanusiaan yang secara total difokuskan untuk meringankan penderitaan korban kekerasan, korban penindasan dan korban diskriminasi baik dibunuh maupun diusir. Kebijakan tersebut tercermin dalam formula 4+1 dari Indonesia.(Kurniawan, 2018)

Misi bantuan kemanusiaan ini akan dilakukan di bawahan pimpinan pemerintah Myanmar dan melibatkan masyarakat Internasional yang dalam hal ini meliputi ICRC dan beberapa negara lain. Atas usulan Indonesia tersebut, pemerintah Myanmar menyambut baik bahwa Indonesia atau ASEAN menjadi bagian penting dalam tema mekanisme pemberian bantuan kemanusiaan di Rakhine State. Penilaian mengenai bantuan apa yang diberikan, target mana yang harus didahulukan akan segera disampaikan". Diplomasi Indonesia yang terjadi pada tahun 2017 ketika puncak krisis Rohingya di Myanmar terjadi difokuskan pada penanganan korban terutama dari kelompok etnis Rohingya. Mereka menjadi korban kekerasan karena ulah aparat keamanan dan kelompok militan yang berlatar belakang Buddhis. Beberapa dari korban ini meninggal dan beberapa terpaksa mengungsi ke perbatasan antara Myanmar dan Bangladesh. Bahkan, sebagian besar dari mereka tinggal di kamp-kamp pengungsi di Bangladesh. Sikap Indonesia terhadap krisis Rohingya dapat dipahami dari pernyataan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi "Indonesia tidak memilih untuk duduk diam dan berteriak, tetapi menggunakan diplomasinya (di Rakhine State) dengan tujuan membantu semua korban dan mencegah situasi semakin memanas".

Bahwa kebijakan Indonesia terhadap krisis Rohingya dilakukan terlebih dahulu dengan membantu semua korban kekerasan di Rakhine

State. Rakhine yang mempengaruhi perbatasan Bangladesh di mana ratusan ribu pengungsi tidak dapat diselesaikan bahkan hingga 2019. Mencegah lebih banyak kekerasan di negara bagian Rakhine sebagai akibat dari tindakan kekerasan dari kelompok militan Rohingnya yang diyakini sebagai radikalisis berlebihan di beberapa kelompok separatis menyebabkan tindakan keras militer Myanmar. Akibatnya, masyarakat sipil menjadi korban karena aksi militer sistematis yang mengakibatkan pengusiran kelompok etnis Rohingya dari tanah Myanmar. Diplomasi bersifat kemanusiaan untuk segera menghentikan para korban yang dijatuhi hukuman di wilayah Rohingya yang berbatasan dengan Bangladesh. Bantuan kemanusiaan ini dikoordinasikan dengan pemerintah Myanmar yang dalam praktiknya dijauhi dunia karena dianggap sebagai kambing hitam dari krisis Rohingya.

Diplomasi kemanusiaan Indonesia juga merupakan bagian dari diplomasi yang melibatkan partisipasi publik karena masyarakat Indonesia memandang masalah Rohingya sebagai bagian dari masalah umat Islam. Bantuan yang diberikan kepada etnis Rohingya mencapai sekitar 74ton berupa sembako, selimut, tempat penampungan air, dan tenda. Kementerian Kesehatan RI juga mengirimkan bantuan berupa satu ton obat-obatan kepada pengungsi Rohingya yang tinggal di perbatasan Bangladesh-Myanmar. Bukti bahwa Indonesia juga bekerja sama dengan masyarakat dalam memberikan bantuan kemanusiaan terlihat dari keterlibatan Rapid Action Response dan Dompot Dhuafa. Dalam salah satu aksinya ACT mengirimkan 2000ton beras ke kawasan pengungsian Rohingya sebagai bukti pentingnya NGO dalam aksi kemanusiaan. Selain LSM, ormas Islam seperti Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah juga turut serta membantu warga Rohingya di pengungsian.(Albayumi, 2018)

Misi bantuan kemanusiaan ini akan dipimpin oleh pemerintah Myanmar dan melibatkan masyarakat internasional, dalam hal ini ICRC dan beberapa negara lainnya. Atas usulan Indonesia, pemerintah Myanmar menyambut baik Indonesia atau ASEAN menjadi bagian penting dalam

mekanisme pemberian bantuan kemanusiaan di Rakhine. Indonesia telah meningkatkan diplomasi dalam kemanusiaannya sehingga perhatian besar masyarakat Indonesia terhadap Muslim Rohingya tersalurkan dan pada saat yang sama perhatian publik ini juga meminta jaminan Myanmar untuk memiliki komitmen yang sama untuk melindungi kelompok etnis Rohingya yang telah menjadi isu internasional.

Indonesia dalam melakukan diplomasi kemanusiaan di Myanmar tidak mengabaikan aspek organisasi regional ASEAN. Indonesia melibatkan ASEAN dalam penyaluran bantuan kemanusiaan di Rakhine State dengan alasan Myanmar adalah anggota ASEAN. Dengan demikian, situasi yang memburuk di Rakhine perlu dibantu tanpa harus melibatkan diri dalam masalah internal anggota Lebih mendalam. Manfaat yang diperoleh Indonesia setidaknya bisa dilihat dari dua aspek yakni tingkat regional dan domestik. Secara regional, posisi Indonesia di ASEAN setidaknya telah menemukan kembali posisinya sebagai pemain kunci, yang akhir-akhir ini tampak memudar. Selain itu, kebijakan kontroversial beberapa anggota besar ASEAN, seperti Malaysia, menambah kepercayaan terhadap Indonesia. Di dalam negeri, peran Indonesia dalam membantu penderitaan Rohingya setidaknya bisa menjadi pelajaran tersendiri mengingat suku dan agama Indonesia jauh lebih plural dibandingkan Myanmar.

Jika kasus Rohingya bisa diurai, tidak akan sulit bagi Indonesia jika hal seperti ini terjadi di dalam negeri. Keunggulan Indonesia dengan kata lain berlipat ganda, yaitu di tingkat regional dimana kredibilitas Indonesia semakin kuat karena Jakarta diterima oleh otoritas Myanmar dalam mengajukan proposal kemanusiaannya. Diplomasi kemanusiaan ini menguntungkan Indonesia dengan meningkatkan citra Indonesia di kawasan karena kemampuannya mengakses Myanmar yang dikenal tertutup bahkan mampu menyalurkan bantuan kemanusiaan yang seringkali ditolak kecuali dalam kasus bencana alam sebelumnya. Di tingkat domestik, pemerintah Indonesia disegani warga karena mampu

mengaktualisasikan aspirasi umat Islam dan masyarakat dalam membantu nasib etnis Rohingya, meski hanya bersifat sementara.

Peran diplomasi kemanusiaan Indonesia terhadap krisis Rohingya sebagaimana diuraikan di atas didasarkan pada landasan politik luar negeri menciptakan perdamaian dan diplomasi kemanusiaan total meringankan penderitaan para korban pada kelompok etnis Rohingya sekaligus mencegah terjadinya kekerasan lebih lanjut. Pada bagian ini dapat dikatakan bahwa diplomasi Indonesia yang bersifat kemanusiaan juga merupakan ajang intelijen diplomasi karena dibukanya dialog dengan pemerintah Myanmar untuk menawarkan solusi politik yang komprehensif. Indonesia menjadikan isu kemanusiaan di negara bagian Rakhine sebagai pijakan untuk mengajukan solusi atas konflik etnis yang telah berlangsung puluhan tahun. Merupakan catatan sejarah bahwa diskriminasi terhadap Rohingya berada pada tahap sosial politik sehingga mereka tidak termasuk dalam sistem politik Myanmar.

Diplomasi kemanusiaan Indonesia ke Myanmar kemudian juga mencakup proposal yang diajukan langsung ke pemerintah Myanmar yang diajukan antara lain kepada Aung San Suu Kyi dan Panglima TNI U Ming Aung Hlaing. Bertemu dengan Suu Kyi, Menlu Retno Marsudi memaparkan solusi komprehensif atas konflik di Rakhine. isi proposal tersebut terdiri dari (i) memulihkan stabilitas dan keamanan; (ii) pengekangan maksimum dan non-kekerasan; (iii) perlindungan semua orang yang tinggal di Negara Bagian Rakhine, tanpa memandang suku atau agama; dan (iv) pentingnya segera dibukanya akses bantuan kemanusiaan.(Johan Kusuma, 2019) Elemen penting lainnya adalah bahwa rekomendasi Laporan Komisi Penasihat untuk Negara Bagian Rakhine, yang dipimpin oleh mantan Sekretaris Jenderal Kofi Annan, Pengajuan proposal ini penting dalam menyelesaikan keseluruhan kasus kelompok etnis Rohingya yang belum mendapat perhatian dunia karena penutupan pemerintah Myanmar. Hampir semua negara yang ingin membantu Myanmar tidak diterima secara terbuka karena sebelumnya mereka mengkritik kebijakan

pemerintah Naypyidaw terhadap warga keturunan Rohingya yang memeluk agama Islam.

Pencarian solusi politik tidak hanya ditujukan ke Myanmar tetapi juga tetangga-tetangganya yang dipandang masih belum bisa diajak untuk memikirkan masa depan suku bangsa ini. Indonesia mengambil sikap tegas dalam krisis Rohingya dengan menekankan bahwa militer Myanmar harus memberikan perlindungan bagi semua orang, terutama warga sipil dan yang lebih penting perempuan dan anak-anak. Pesan ini merupakan cerminan politik luar negeri Indonesia dalam menghadapi konflik Rohingya. Perlindungan manusia merupakan bagian dari keamanan manusia dalam konteks hubungan internasional. Dalam konflik yang terjadi kekerasan, warga sipil, terutama anak-anak dan perempuan, menjadi korban terbesar karena pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tidak melakukan diskriminasi. Selanjutnya, dengan diplomasi kemanusiaan ini, Indonesia berperan sebagai negara yang peduli, terhadap perdamaian kawasan. Dengan kehadirannya di Myanmar, peran Indonesia di kawasan secara tidak langsung memiliki catatan yang baik sebagai penjamin perdamaian, sesuatu yang dibutuhkan dalam menciptakan lingkungan Asia Tenggara yang tenang. Namun, formula Indonesia untuk Myanmar yang dapat dimaknai sebagai solusi politik dan komprehensif terhadap kasus Rohingya. (Darmawan Wahanda Saputra, n.d.)

SIMPULAN

Organisasi-organisasi yang berperan dalam menanggapi krisis kemanusiaan etnis yaitu ASEAN dan OKI. Peran ASEAN yang diberikan lebih besar dalam bentuk kemanusiaan. ASEAN mengupayakan dengan melakukan diplomatik dengan negara-negara asia seperti indonesia, Malaysia, Myanmar. ASEAN dan negara asia lainya fokus menyelesaikan para pengungsi yang terdampar di laut-laut yang cukup memperhatikan berbagai negara. ASEAN mengangkat kedalam isu internasional hal ini dibuktikan dengan melakukan kerjasama dengan berbagai organisasi internasional seperti UNHCR, UNODC, dan IOM. Upaya yang

dilakukan OKI dalam menanggapi krisis yang terjadi terhadap warga sipil etnis rohingya yaitu, OKI melakukan hubungan diplomatik dan kemanusiaan yang mendesak Myanmar agar dapat bekerjasama sama dengan UNHCR dalam mengembalikan pengungsi ke tempat tinggal masing-masing dan melakukan pertemuan dengan Dewan HAM PBB dalam menyikapi krisis kemanusiaan yang terjadi di Myanmar. OKI mengadopsi proposal pakistan, berisi penegasan tentang pengecaman tindakan pemerintah Myanmar, menyuruh Myanmar agar dapat memastikan keamanan dan perlindungan rakyatnya tanpa adanya diskriminasi dan mengakui etnis rohingya sebagai warga negara Myanmar. Adapun pengaruh diplomasi Indonesia dalam menyikapi tindakan krisis kemanusiaan yang terjadi di Myanmar yaitu diplomasi yang dilakukan dengan pemerintah Myanmar fokus pada perlindungan kemanusiaan yaitu berupa pengiriman bantuan antara lain seperti pangan dan obat-obatan kepada daerah-daerah yang terkena dampak krisis kemanusiaan tersebut. Selain memberikan bantuan kemanusiaan kepada korban, indonesia juga menawarkan solusi atas krisis yang terjadi agar tragedi konflik tersebut tidak berlarut-larut. Diplomasi ini mempengaruhi dunia internasional dan juga organisasi-organisasi kemanusiaan maupun non kemanusiaan baik internasional maupun nasional untuk turut serta memberikan bantuan kepada para korban sipil diskriminasi pemerintahan Myanmar.

DAFTAR PUSTAKA

- Aab Wahabi, A. (2018). From Myanmar To Malaysia Protracted Refugee Situations og Rohingya People. *International Journal of Engineering & Technology*, 93.
- Albayumi, F. (2018). Diplomasi Indonesia Dalam Menyelesaikan Krisis Pengungsi Rohingya Tahun 2017. *Nation State Journal of International*, 1(1), 121.
- Alfajri, A. (2017). Studi Kasus Demokrasi dan Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Krisis Rohingya 2012-2017. *Atlantis Press*, 129, 67.
- Arianta, K., Gede Sudika Mangku, D., Putu Rai Yulianti, & Ni Putu Rai Yulianti; Dewa Gede Sudika Mangku. (2020). *Perlindungan Hukum*

- Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *E-Journal Komunitas Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha*, 3(2), 169.
- Asriyani, D. (2013). Peran Office of The High Commissioner for Human Right Dalam Penyelesaian Kasus Genosida Etnis Rohingya Di Myanmar (1978-2012). *Jurnal Hubungan Internasional*, 1(2), 50.
- Darmawan Wahanda Saputra, V. (n.d.). *Diplomasi Indonesia Dalam Penanganan Krisis Imigran Etnis Rohingya Tahun 2015*.
- Gede Sudika Mangku, D. (2013). Kasus Pelanggaran HAM Etnis Rohingya Dalam Perspektif ASEAN. *Media Komunikasi FIS*, 12(2), 61.
- Itchikaya Mitzy, G. (2014). Perlawanan Etnis Muslim Rohingya Terhadap Kebijakan Diskriminatif Pemerintahan Burma-Myanmar. *Indonesia Journal of International Studies*, 1(2), 154.
- Jati, I. (2017). Studi Banding Peran ASEAN dan Organisasi Kerjasama Islam Dalam Menanggapi Krisis Rohingya. *Jurnal Studi Asia Tenggara*, 1(1), 23.
- Johan Kusuma, A. (2019). Strategi Diplomasi Kemanusiaan Pemerintahan Indonesia Dalam Kasus Krisis Kemanusiaan Yang Dialami Etnis Rohingya di Myanmar Tahun 2017. *Jurnal Mandala*, 2(2), 161–162.
- Joisafita Tangdialla, A. (2019). Krisis Rohingya: Analisis Respon ASEAN Dalam Teori Liberalisme. *Jurnal Social Politics*, 20(2), 195.
- Kania, D. (2015). Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Pekerja Domestik Di Indonesia. *Jurnal Yustisia*, Edisi 91, 40.
- Kania, D. (2018). *Hak Asasi Manusia Dalam Realitas Global*. Manggu Makmur Tanjung Lestari.
- Khairi, A. (2016). The Dilemma of Rohingya Refugees “Boat People”; The Role of Malaysia, Its Neighbors and ASEAN. *International Journal of Academic Research In Business and Social Science*, 6(12), 484.
- Kurniawan, N. (2018). Kasus Rohingya dan Tanggung Jawab Negara Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Konstitusi*, 14(4), 4.
- Nawawi, J. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru Dari

- Kriminalisasi di Indonesia. *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 4(2), 164–165.
- Pesona Sadewa, D. (2019). Kebijakan Luar Negeri Indonesia Dalam Memberikan Bantuan Pengungsi Rohingya di Bangladesh. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 15(2), 99.
- Priyahita Pudjibudojo, W. (2019). Kritik Penanganan Pengungsi Rohingya di Asia Tenggara Oleh ASEAN dan Anggotanya. *Jurnal Ilmu Politik*, 10(2), 230.
- Rantau Itasari, E. (2020). Peran ASEAN Inter Government Komisi Hak Asasi Manusia Dalam Memberi Perlindungan Terhadap Etnik Rohingya Di Asia Tenggara. *Jurnal IUS; Kajian Hukum Dan Keadilan*, 8(3), 530.
- Rosyid, M. (2019). Peran Indonesia Dalam Menangani Etnis Muslim Rohingya di Myanmar. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 49(3), 630.
- Rosyidin, M. (2015). Etika Kebijakan Luar Negeri Indonesia Dalam Isu Rohingya. *Jurnal Analisis CSIS*, 44(2), 180.
- Roy Chowdhury, A. (2020). An “Un-Imagined Community”. The Entangled Genealogy of an Exclusivist Nationalism in Myanmar and Rohingya Refugee Crisis. *Social Identities*, 1.
- Salman Sohel, M. (2017). The Rohingya Crisis in Myanmar: Origin and Emergence. *Saudi Journal of Humanities and Social Sciences*, 2, 1013.
- Setiawan, A., & Hamka. (2019). *Peran Diplomasi Kemanusiaan Indonesia Terhadap Krisis Rohingya di Myanmar*. Universitas Muhamadiyah.
- Sun, Y. (2014). Myanmar’s ASEAN Chairmanship. *Stimson*, 4, 9.
- Ullah, A., & Chattoraj, D. (2018). Roots of Discrimination Against Rohingya Minorities: Society, Ethnicity and International Relation. *International Islamic University Malaysia*, 26(2), 19.